ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

Disusun Oleh:

Muhammad Harris Maulana

1118 30578

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2021

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD HARRIS MAULANA

No Induk Mahasiswa: 111830578

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 26 Desember 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing	Penguji
Algifari, Drs., M.Si.	Rudy Badrudin, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 26 Desember 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dampak Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Muhammad Harris Maulana
STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris dampak Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), dan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2020. Model ekonometri yang digunakan adalah regresi data panel. Model regresi estimasi terbaik untuk menjelaskan dampak DAU, BM, dan PDRB terhadap PAD dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman adalah model *fixed effects* dengan pembobotan. Penelitian ini tidak menemukan bukti empiris dampak positif DAU dan BM terhadap PAD, sedangkan PDRB memiliki dampak positif terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasar hasil penelitian ini kami merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan agar mengevaluasi pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal agar berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Produksi Domestik Regional Bruto Pendapatan Asli Daerah, Model Regresi Data Panel

Abstract

The aims of this research is to find an empirical evidence of the impact of the General Allocation Funds (DAU), Capital Expenditure (BM), and Gross Domestic Regional Product (PDRB) on Original Local Government Revenue (PAD) Regency/City in Province of South Kalimantan, consisting of 13 regencies and 2 cities in the Province of South Kalimantan in 2015-2020. The econometric model used in this research is a panel data regression model. The best estimation regression model to explain the impact of DAU, BM, and PDRB on PAD in this research based on the results of the Chow test and Hausman test is the weighted fixed effects model. This research found that there are no empirical evidence of the positive impact of DAU and BM on PAD, whereas PDRB has a positive impact on the PAD of regencies/cities in the province of South Kalimantan. Based on the results we recommend to the regencies/cities government in the province of South Kalimantan to evaluate the management of the General Allocation Funds and Capital Expenditure so that they have a positive impact on Regional Original Income in order to increase regional independence.

Keywords: General Allocation Funds, Capital Expenditure, Gross Domestic Regional Product Original Local Government Revenue, Panel Data Regression Model

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pendahuluan

Otonomi daerah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan suatu daerah sebagai rangka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah. Otonomi daerah juga dianggap sebagai sebuah kebijakan yang demokratis serta memenuhi efektivitas desentralisasi pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dapat menyesuaikan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Dalam perjalanannya, otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif dari tanggal 1 Januari 2001, yang kemudian didasari atas peraturan mengenai pemerintah daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004 dan peraturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu UU No. 33 Tahun 2004.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan satu provinsi yang ada di Indonesia dan telah menerima kewenangan untuk menjalankan kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Adanya kebijakan otonomi daerah tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat menentukan sendiri kebijakan pembangunan daerah, termasuk di antaranya adalah mengelola pendapatan dan belanja daerah.

Bagi pemerintah pusat, penyerahan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah kepada pemerintah daerah seperti pendapatan dan belanja daerah merupakan hal yang penting dalam sebuah proses kelancaran otonomi daerah (Hamsiah, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari wilayah lokal setempat, terdiri dari berbagai macam sumber pendapatan dan didasari dengan peraturan daerah setempat. PAD digunakan oleh daerah sebagai sumber pendanaan belanja dan kebutuhan daerah oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria dan tolak ukur otonomi daerah (Harliza dan Anitasari, 2017).

Ketergantungan pembiayaan daerah pada dana yang berasal dari pemerintah pusat dapat diminimalkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diharapkan dapat menjadikan daerah mampu secara lebih leluasa dalam mengalokasikan belanja untuk kepentingan pembangunan daerahnya (Hamsiah, 2019). Adanya kebebasan pemerintah daerah tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan kemandirian daerah.

Setiap daerah telah memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam sistem pemerintahan bersifat desentralisasi yang dianut di Indonesia saat ini penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dana tersebut dapat digunakan pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya. Dana tersebut berupa dana perimbangan atau dana transfer. Upaya ini dimaksudkan sebagai usaha pemerintah pusat untuk mencapai kesejahteraan berbagai daerah di Indonesia (Noor, 2012).

Pemberian dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan mampu menanggulangi kesenjangan pembangunan yang terdapat di daerah (Hananto, 2018). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa terciptanya Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan untuk melakukan penyebaran dan pemerataan keuangan daerah, dimana dana tersebut diharapkan dapat memenuhi keinginan pemerintah pusat dalam mengupayakan terselenggaranya proses desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) inilah kemudian nantinya juga menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebutuhan belanja daerahnya. Penggunaan DAU ini sepenuhnya dikelola oleh daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Melalui politik anggaran daerah diharapkan DAU ini mempu meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Alokasi bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana transfer atau dana perimbangan dapat menimbulkan sebuah permasalahan, yakni adanya fenomena *flypaper effect*. Fenomena *flypaper effect* adalah suatu keadaan di mana belanja daerah lebih

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dominan bersumber dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu dana transfer daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Fenomena *flypaper effect* terjadi ketika belanja daerah didominasi DAU dibandingkan dengan penggunaan dana yang mempunyai sumber dari pemasukan daerah lokal sendiri yaitu disebut Pendapatan Asli Daerah (Salawali *et al*., 2019).

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2012) dalam Nopitasari (2017) belanja modal berperan penting dalam kelancaran kepentingan pemerintah daerah termasuk kebutuhan daerah mengenai sarana dan prasarana fasilitas publik. Untuk memenuhi belanja modal, diperlukan adanya pendapatan daerah. Semakin tinggi tingkat belanja modal yang dilakukan, semakin tinggi pula kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan belanja modal tersebut. Belanja modal yang terpenuhi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hartati, 2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Setiap daerah berusaha agar pertumbuhan ekonomi selalu terjadi dari waktu ke waktu. Adanya pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari perkembangan Produksi Domestik Regionel Bruto (PDRB). Dengan demikian PDRB dapat digunakan sebagai alat ukur pemerintah untuk mengetahui kemajuan ekonomi suatu daerah. Menurut Rahman dan Chamelia (2015) pengukuran yang dihasilkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menjadi tolak ukur sejauh mana daerah mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerahnya.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan anggaran pemerintah daerah telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun belum banyak penelitian yang bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal PAD merupakan sumber pendapatan daerah utama yang diharapkan mampu mendominasi belanja daerah. Karena salah satu faktor yang dapat menjadi penentu sebuah keberhasilan daerah dalam menjalankan otonominya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris dampak Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan DAU dan Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Hipotesis

Salah satu dana perimbangan atau dana yang ditransfer kepada pemerintah daerah dan merupakan bentuk bantuan dari pemerintah pusat, yang salah satu penggunaannya untuk bidang pembangunan daerah merupakan definisi dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam melakukan belanja daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dari hal tersebut artinya keduanya memiliki kesamaan sebagai sumber pendapatan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan belanjanya. Penelitian tentang pengaruh dana perimbangan terhadap pendapatan daerah sudah banyak diteliti, tetapi tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara khusus masih sangat sedikit dilakukan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengalokasikan DAU untuk kegiatan pembangunan daerah melalui politik anggaran. Permasalahannya adalah apakah pengalokasian DAU oleh pemerintah daerah mempu meningkatkan kemandirian daerah melalui pengingkatan Pendapatan Asli Daerah?

Penelitian tentang pengaruh DAU terhadap PAD telah dilakukan sebelumnya. Namun penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang beragam. Penelitian Algifari dkk. (2021) menggunakan data 33 provinsi di Indonesia periode 2016-2018 menggunakan model *Partial*

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Least Square menyimpulkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. Penelitian Frelistiyani (2011) menggunakan data 255 kabupaten/kota di Jawa periode 2006-2008 menyimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa. Penelitian Vanchris dkk. (2013) menggunakan Kabupaten/Kota Se-Sumbagsel tahun 2008-2012 menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumbagsel. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Belanja modal pemerintah adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli asset daerah, baik berupa aset tetap maupun aset lainnya. Pembelian aset daerah ini dilakukan untuk menunjang perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Perkembangan kegiatan ekonomi daerah menghasilkan potensi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Darwanis dan Saputra (2014) dalam penelitiannya menemukan adanya bukti empiris pengaruh positif belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian Puspitasari dkk. (2015) dan Nugroho (2012) menunjukkan belanja modal berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian di atas penelitian ini merumuskan hipotesis ke tiga sebagai berikut:

H2: Belanja Modal berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan aktivitas ekonomi daerah dari aspek produksi dan pengeluaran. Semakin tinggi PDRB, semakin tinggi pula tingkat aktivitas ekonomi daerah. Tingginya aktivitas ekonomi daerah merupakan potensi penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa penelitian tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Nuriman (2018) menyimpulkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Hasil penelitian Devi (2019) juga menemukan bukti pengaruh positif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota Ex Karesidenan Kediri Jawa Timur. Berdasarkan uraian penelitian ini merumuskan hipotesis ke dua sebagai berikut:

H3: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah data PAD, DAU, BM, dan PDRB 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selatan dalam periode 2015-2020 yang diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.

Data penelitian ini menggunakan gabungan data *time series* dan data *cross section*, sehingga model ekonometri yang baik digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah model regresi data panel. Bentuk umum model ekonometri regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{PAD_{it} = ß_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Model regresi data panel menghasilkan tiga macam model estimasi, yaitu model *common effects*, model *fixed effects*, dan model *random effects*. Untuk menentukan model terbaik menjelaskan hubungan pengaruh variabel independen (DAU, BM, dan PDRB) terhadap variabel dependen (PAD) di antara tiga model estimasi tersebut digunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier.

4. Analisis dan Pembahasan

Model *common effects* berasumsi konstanta dan koefisien regresi semua kabupaten/kota adalah tidak berbeda. Sedangkan model *fixed effects* berasumsi konstanta model regresi semua kabupaten/kota adalah berbeda dan koefisien regresi tidak berbeda. Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini berturut-turut menyajikan nilai statistic model *common effects* dan model *fixed effects*.

Tabel 1. Nilai Statistik Model *Common Effects*

Variabel	Koefisien	*Std. Error*	t statistik	Prob. t statistik
C	-5,140600	4,610024	-1,11509	0,2684
DAU	0,724156	0,235614	3,073483	0,0030
BM	0,117294	0,114999	1,019958	0,3111
PDRB	0,304956	0,078706	3,874602	0,0002
R-sqr.	0,386671			
F stat.	15,55099			
Prob. F stat.	0,000000			

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 2. Nilai Statistik Model *Fixed Effects*

Variabel	Koefisien	*Std. Error*	t statistik	Prob. t statistik
C	-9,375543	6,697901	-1,399773	0,1666
DAU	0,192944	0,380558	0,507002	0,6140
BM	0,040112	0,058486	0,685836	0,4954
PDRB	1,014751	0,174951	5,800196	0,0000
R-sqr.	0,911855			
F stat.	42,75896			
Prob. F stat.	0,000000			

Sumber: Data diolah, 2021

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penentuan model mana yang dinilai paling tepat antara model *common effect* dan model *fixed effect*, dapat ditentukan melalui sebuah uji yang disebut uji Chow. Rumusan hipotesis nol (H0) uji Chow menyatakan model *common effects* lebih cocok dibandingkan model model *fixed effects*. Hipotesis alternatif (HA) menyatakan model *fixed effects* lebih cocok daripada model *common effects*. Hipotesis nol ditolak apabila nilai probabilitas F statistik kurang dari 0,05. Tabel 3 berikut ini menyajikan nilai statistik uji Chow.

Tabel 3. Nilai Statistik Uji Chow

Test	F Statistik	*Degree of freedom (d.f)*	Prob. F Statistik
Cross-section F	30,783858	(12,62)	0,0000
Cross-section Chi-square	151,313445	12	0,0000

Sumber: Data diolah, 2021

Nilai probabilitas F statistik uji Chow yang disajikan pada Tabel 3 adalah sebesar 0,0000 kurang dari 0,05 menunjukkan keputusan uji Chow adalah menolak H0. Dengan demikian, dibandingkan dengan model *common effect*, hasil uji Chow menunjukkan model *fixed effects* lebih tepat digunakan untuk menguji dampak Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Model *fixed effects* bersifat konsisten, namun cenderung tidak efisien. Sedangkan model *random effects* memiliki sifat efisien, namun model ini cenderung tidak konsisten. Model regresi yang paling tepat adalah model estimasi yang bersifat konsisten dan efisien. Tabel 4 berikut ini menyajikan nilai statistik model *random effects*.

Tabel 4. Nilai Statistik Model *Random Effect*

Variabel	Koefisien	*Std. Error*	t statistik	Prob. t statistik
C	-5,144745	5,407020	-0,951494	0,3445
DAU	0,453091	0,307333	1,474267	0,1447
BM	-0,004641	0,054800	-0,084685	0,9327
PDRB	0,643477	0,122129	5,268808	0,0000

R-sqr.	0,356426
F stat.	13,66097
Prob. F stat.	0,000000

Sumber: Data diolah, 2021

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah model *random effects* memiliki sifat yang konsisten. Rumusan hipotesis nol (H0) uji Hausman menyatakan model *random effects* bersifat konsisten. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan model *random effects* bersifat tidak efisien. Jika hasil uji Hausman tidak menolak H0 menunjukkan model *random effects* memiliki sifat konsisten dan efisien. Hipotesis nol ditolak apabila nilai probabilitas *Chi-Square* statistik kurang dari 0,05. Tabel 5 berikut ini menyajikan nilai statistic uji Hausman.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5. Nilai Statistik Uji Hausman

Test	*Chi-Sq.* Statistik	*Chi-Sq. (d.f)*	Prob. *Chi-Sq.* Statistik
Cross-section random	13,274994	3	0,0041

Sumber:Data diolah, 2021

Pada Tabel 5 disajikan nilai probabilitas *Chi-Square* statistik sebesar 0,0041 kurang dari 0,05 menunjukkan hipotesis nol uji Hausman adalah ditolak. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa model *random effects* bersifat tidak konsisten. Kriteria model regresi estimasi yang baik mengutamakan model regresi yang bersifat konsisten dibandingkan model yang bersifat efisien. Berdasarkan hasil uji Hausman model estimasi yang lebih baik adalah model *fixed effects* daripada model *random effects*.

Model *fixed effect* memiliki sifat cenderung tidak efisien. Hal ini disebabkan karena kemungkinan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model *fixed effects* tersebut. Untuk memperoleh model *fixed effect* yang efisien perlu membandingkan antara model *fixed effect* tanpa pembobotan (*no weights*) dan model *fixed effect* dengan pembobotan (*weights*). Model *fixed effect* yang memiliki nilai statistik lebih baik menunjukkan model *fixed effect* yang efisien. Tabel 6 berikut ini menyajikan nilai statistik model *fixed effect* tanpa pembobotan (*no weights*) dan model *fixed effect* dengan pembobotan (*weights*).

Tabel 6. Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* dengan Pembobotan *(Weights)*

Variabel	Koefisien	*Std. Error*	t statistik	Prob. t statistik
C	-10,28207	5,474421	-1,878202	0,0651
DAU	0,259864	0,339900	0,764530	0,4475
BM	0,056107	0,046349	1,210536	0,2307
PDRB	0,982388	0,134252	7,317471	0,0000
Weighted Statistic				
R-sqr.	0,932791			
F stat.	57,36662			
Prob. F stat.	0,000000			

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 7 berikut ini menyajikan perbandingan nilai statistik model *fixed effect* tanpa pembobotan (*no weights*) dan model *fixed effect* dengan pembobotan (*weights*).

Tabel 7. Hasil Perbandingan *Fixed Effect Model* Tanpa Pembobotan *(No Weights)* dan Dengan Pembobotan *(Weights)*

Nilai Statistik t (Nilai Probabilitas)	Tanpa Pembobotan	Dengan Pembobotan
DAU	0,507002 (0,6140)	0,764530 (0,4475)
BM	0,685836 (0,4954)	1,219536 (0,2307)
PDRB	5,800196 (0,0000)	7,317471 (0,0000)
F stat.	42,75896	57,36662
Probabilitas F stat.	0,000000	0,000000

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

R-Squared	0,911522	0,932791

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 7 menunjukkan nilai statistik pada model *fixed effects* dengan pembobotan lebih baik daripada nilai statistik model *fixed effects* tanpa pembobotan. Nilai F statistik pada model *fixed effects* dengan pembobotan adalah 57,36662 lebih tinggi dibandingkan pada model *fixed effects* tanpa pembobotan adalah 42,75896. Nilai R-Square pada model *fixed effects* dengan pembobotan adalah 0,932791 lebih tinggi daripada R-Square pada *fixed effects* tanpa pembobotan yaitu sebesar 0,911522. Dengan demikian dari ketiga model estimasi regresi data panel yang terbaik untuk penelitian ini adalah model *fixed effects* dengan pembobotan. Pengujian dampak DAU, BM, dan PDRB terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan model *fixed effects* dengan pembobotan.

Tabel 8 berikut ini menyajikan nilai statistik uji t model *fixed effects* dengan pembobotan. Uji t pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 dan nilai t kritis adalah 1,66571.

Tabel 8. Hasil Uji t Statistik

Variabel	Koefisien	*Std. Error*	t statistik	Prob. t statistik	Hipotesis Penelitian
C	-10,28207	5,474421	-1,878202	0,0651	-
DAU	0,259864	0,339900	0,764530	0,4475	Tidak Terbukti
BM	0,056107	0,046349	1,210536	0,2307	Tidak Terbukti
PDRB	0,982388	0,134252	7,317471	0,0000	Terbukti

Sumber: Data diolah, 2021

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berdampak positif terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian tersebut mengartikan Dana Alokasi Umum yang semakin meningkat tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian t statistik dimana nilai koefisien regresi sebesar 0,259864 dan nilai t statistik sebesar 0,764530 lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar 1,66571, selanjutnya hal tersebut juga didukung dengan nilai probabilitas t statistik sebesar 0,4475 yang lebih besar daripada nilai tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Hipotesis pertama pada penelitian ini tidak terbukti.

Kenaikan Dana Alokasi Umum tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat disebabkan oleh karena Dana Alokasi Umum berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah dampaknya tidak terjadi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditujukan lebih kepada pemerataan pembangunan setiap daerah, misalnya sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang berkaitan khususnya mengenai pembangunan, sehingga pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah relatif sangat sedikit dan mungkin saja berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak pada periode yang sama.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil beberapa penelitian sebelumnya. Algifari dkk. (2021) menggunakan data 33 provinsi di Indonesia menyimpulkan DAU berpengaruh negatif terhadap PAD. Demikian juga hasil penelitian Frelistiyani (2011) menggunakan data

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kabupaten/kota di Jawa menyimpulkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Vanchris dkk. (2013) menggunakan Kabupaten/Kota Se-Sumbagsel tahun 2008-2012 menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis bahwa Dana Alokasi Umum berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Dana Alokasi Umum tidak berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terjadi mungkin saja karena penggunaan Dana Alokasi Umum pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung berfokus pada pembangunan yang tidak mempunyai imbas secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga setiap kenaikan Dana Alokasi Umum disini tidak dapat menjadikan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel Belanja Modal tidak berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,056107 dan nilai t statistik sebesar 1,210536 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,66571 dan nilai probabilitas t statistiknya sebesar 0,2307 lebih besar daripada nilai tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji t ini hipotesis ke dua tidak terbukti.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Saputra (2014) menggunakan data Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh membuktikan adanya pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian Puspitasari dkk (2015) menggunakan data di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya. Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Belanja Modal tidak berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang artinya setiap peningkatan Belanja Modal tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dapat terjadi karena Belanja Modal yang dilakukan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli aset daerah yang hasilnya tidak mampu meningkatkan kegiatan ekonomi pada periode ini, namun mungkin saja berdampak pada periode yang akan datang. Dengan demikian, peningkatan Belanja Modal periode ini tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah periode ini.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah

Koefisien regresi PDRB sebesar 0,982388 memiliki nilai nilai t statistik sebesar 7,317471 lebih besar dari nilai t tabel 1,66571 dan nilai probabilitas t statistik sebesar 0,0000 lebih kecil daripada nilai taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Hasil pengujian menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis ke tiga penelitian ini terbukti.

Hasil penelitian ini menyimpulkan semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah meningkat. Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator untuk mengukur keadaan kemandirian dan keuangan suatu daerah. Jika Poduk Domestik Regional Bruto suatu daerah mengalami peningkatan menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat daerah tersebut. Peningkatan kondisi ekonomi masayarakat ini merupakan potensi meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuriman (2018) menggunakan data di Provinsi Banten dan Devi (2019) menggunakan data Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kediri yang

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyimpulkan bahwa Produksi Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 9 menyajikan nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi (R-Square) model estimasi *fixed effects* dengan pembobotan yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini.

Tabel 9. Nilai Statistik F dan R-Squared

R-Squared	F-Statistik	Prob. F-Statistik	(N1,N2)	F Tabel
0,932791	57,36662	0,0000	(3,74)	2,73

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 9 menunjukkan nilai F hitung model *fixed effects* dengan pembobotan adalah 57,36620 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,73 dan nilai Probabilitas F statistik sebesar 0,000000 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai R-Squared sebesar 0,932791 menunjukkan kemampuan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto menjelaskan Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah sebesar 93,28%. Sisanya sebesar 0,0672 atau 6,72% dijelaskan oleh variabel lain selain Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum tidak berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya, setiap kenaikan Dana Alokasi Umum tidak dapat menjadikan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terjadi karena Dana Alokasi Umum digunakan pemerintah daerah berfokus kepada pembangunan daerah yang imbasnya tidak terjadi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Belanja Modal tidak berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga setiap naiknya Belanja Modal tidak menjadikan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan. Keadaan tersebut dapat terjadi karena pendanaan untuk Belanja Modal cenderung lebih dominan menggunakan pendanaan lain selain Pendapatan Asli Daerah seperti Dana Alokasi Umum.
3. Produk Domestik Regional Bruto berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga setiap Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan akan menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto dapat menjadikan kondisi perekonomian masyarakat dinilai lebih mampu untuk memenuhi pemenuhan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang akan berimbas kepada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

6. Keterbatasan dan Saran

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum yang tidak berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah mengasumsikan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena digunakan untuk pendanaan-pendanaan yang tidak berorientasi langsung terhadap keuntungan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan prioritas pengalokasian Dana Alokasi Umum terhadap pendanaan-pendanaan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Belanja Modal tidak berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini terjadi karena belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih banyak digunakan kepada pembangunan sarana dan prasarana publik yang tidak secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan-pembangunan yang dapat menggali potensi-potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya pembangunan yang dapat meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal hasil penelitian ini tidak berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan meneliti pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Produksi Domestik Regional Bruto. Dengan kata lain PDRB memediasi dampak Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyarankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan agar mengevaluasi pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal agar berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.
5. Penelitian mengenai keuangan daerah telah banyak dilakukan, namun khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai variabel dependen masih sedikit dilakukan. Sehingga diharapkan kedepannya penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai variabel dependen akan lebih banyak dilakukan, agar dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi peneliti lainnya, pemerintah, ataupun masyarakat.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Algifari dkk. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Transfer untuk Kemandirian Pembiayaan Daerah di Indonesia Menggunakan Model Struktural Partial Least Square. *Business and Accounting Education Journal*. Vol. 2 No. 1: 10-21.

_____. (2021). *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian bisnis dan Ekonomi dengan EViews 11*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

[BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. 2020. Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2015 sampai Tahun 2020.

Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, *1*(2), 183–199. https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628

Devi, N. A. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Se Eks Karesidenan Kediri. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Frelistiyani, W., & Rohman, A. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening *(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa pada Tahun 2006-2008)*. Universitas Diponegoro.

Hamsiah, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah* (Issue January).

Hananto, F. D. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung (2012-2016)*. *10*(1), 279–288. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8497

Harliza, T., & Anitasari, M. (2017). Analisis Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *5*(2), 133–140. https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.382.

Hartati, H. D. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kota Balikpapan. *Journal of Innovation in Business and Economics (JIBE), 4 No. 2*, 113–130. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jibe.v4i2.2250

Noor, M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia (UNDP)*.

Nopitasari, E. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Bruto Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015). *Jurnal Akuntansi Syariah IAIN Surakarta*, 1–80. https://core.ac.uk/download/pdf/296469733.pdf.

Nuriman, L. (2018). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten*. 1–6.

Puspitasari, N. L. P. L., Adiputra, I. M. P., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Pengaruh

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng). *E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, *3*(1), 1–10.

Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, *8*(1), 88–99. https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857

Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lapian, A. C. H. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *18*(2). https://doi.org/10.35794/jpekd.12790.18.2.2016

Vanchris, Deo Rizki dkk. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumbagsel Tahun 2008-2012). *Jurnal Fairness*. Volume 3 Nomor 2: 135-144.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

repository.stieykpn.ac.id